

SKRIPSI

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TERHADAP
PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN
TIMUR**

Disusun Oleh:

Aldi Mayung Sera

NIM: E105111042



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2023

SKRIPSI

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TERHADAP PEMINDAHAN
IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN TIMUR**

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Aldi Mayung Sera

NIM: E1051181042

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TERHADAP PEMINDAHAN
IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN TIMUR**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

ALDI MAYUNG SERA
E1021181042

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Jumadi, M.Si

NIP. 197108051997021001

Tanggal. 13 - 3 - 2023

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Asmadi, M.Si

NIP. 196202041988101001

Tanggal. 13 - 3 - 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA TERHADAP PEMINDAHAN
IBU KOTA NEGARA KE KALIMANTAN TIMUR**

Oleh:

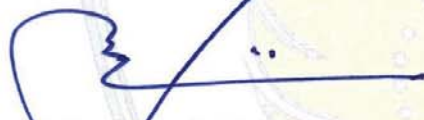
Aldi Mayung Sera

NIM: E1051181042

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Senin, 27 Maret 2023
Waktu : 10.00-11.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang R3

Tim Penguji

Ketua


Dr. Jumadi, M.Si
NIP. 197108051997021001

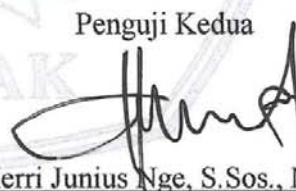
Sekretaris


Drs. Asmadi, M.Si
NIP. 196202041988101001

Penguji Utama


Dr. Bakran Suni, M.Ag
NIP. 195912121990021001

Penguji Kedua


Herri Junius Nge, S.Sos., M.Si
NIP. 198506092015041002

Disahkan Oleh:

Dekan Fisp Untan



Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
197205212006041001

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Fisip Untan terhadap pemindahan Ibu kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. permasalahan dari penelitian ini adalah adanya pro dan kontra dari berbagai pihak mengenai pemindahan Ibu kota Negara serta tidak adanya pernyataan sikap secara terang-terangan oleh mahasiswa Fisip Untan terkait pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan Timur. Permasalahan ini dianalisis menggunakan teori faktor yang mempengaruhi persepsi oleh Mifta Thoha, yaitu faktor internal yang terdiri dari sikap dan kepribadian, keinginan atau harapan dan motivasi, serta faktor eksternal yang terdiri dari latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh dan pengetahuan, kebutuhan sekitar dan intensitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Fisip Untan terhadap pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan Timur yang paling dominan ada dua yaitu faktor sikap dan kepribadian serta faktor informasi yang diperoleh dan pengetahuan. Pertama faktor sikap dan kepribadian, yaitu kepribadian mahasiswa Fisip Untan yang optimis dan percaya pada pemerintah dalam pengambilan dan eksekusi kebijakan yang di ambil. *Kedua*, faktor informasi yang diperoleh dan pengetahuan yang diterima mahasiswa Fisip Untan ini mempengaruhi mereka untuk menolak maupun menyetujui pemindahan Ibu kota Negara. Saran dalam penelitian ini adalah pemerintah diharapkan untuk lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai pemindahan Ibu kota Negara ini kepada masyarakat, termasuk mahasiswa. Untuk mahasiswa, harus bisa mengetahui lebih banyak informasi mengenai kebijakan yang diambil pemerintah yang berdampak pada masyarakat termasuk pemindahan Ibu kota Negara ke Kalimantan Timur.

Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Ibukota Negara, Kalimantan Timur.

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify and analyze the factors that influence the perceptions of Untan Social Sciences students regarding the transfer of the National Capital from DKI Jakarta to East Kalimantan. The problem of this research is that there are pros and cons from various parties regarding the transfer of the National Capital and the absence of open statements by Untan Social Sciences students regarding the transfer of the National Capital to East Kalimantan. This problem is analyzed using the theory of factors that influence perception by Mifta Thoha, namely internal factors consisting of attitudes and personality, desires or expectations and motivation, as well as external factors consisting of family background, information obtained and knowledge, surrounding needs and intensity. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive type. The results of this study are that there are two factors that influence the perceptions of Untan Social Sciences students towards the transfer of the State Capital to East Kalimantan, the most dominant of which are attitude and personality factors as well as information obtained and knowledge factors. The first is the attitude and personality factor, namely the personality of the Untan Social Sciences student who is optimistic and believes in the government in making and executing the policies taken. Second, the factors of information obtained and knowledge received by Untan Social Sciences students influenced them to reject or approve the transfer of the National Capital. The suggestion in this study is that the government is expected to be more aggressive in socializing the transfer of the National Capital to the public, including students. For students, they must be able to find out more information about policies taken by the government that have an impact on society, including the transfer of the National Capital to East Kalimantan.

Keywords: Perception, Student, State Capital, East Kalimantan.

RINGKASAN PENELITIAN

Skripsi ini berjudul **“Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Terhadap Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur”**. Judul ini diambil karena memiliki fenomena menarik pada saat pengambilan kebijakan oleh pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke lokasi terpilih yaitu provinsi Kalimantan Timur ini menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Hampir semua lapisan masyarakat membahas mengenai hal ini. Namun di sedikit berbeda dari biasanya, mahasiswa Fisip Untan yang terkenal sebagai mahasiswa yang paling aktif dan responsif terhadap fenomena dan sering melakukan demonstrasi pada polemik pemindahan Ibukota Negara ini terkesan diam dan pasif. Tidak ada diskusi yang dilakukan ataupun aksi atau demonstrasi. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Fisip Untan terhadap pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Fisip Untan yang terdiri dari perwakilan angkatan dan perwakilan Pengurus Hima-UKM serta BEM-DPM dan dosen Fisip Untan. Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif dengan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang dominan dalam mempengaruhi persepsi mahasiswa Fisip Untan mengenai setuju maupun menolak kebijakan pemindahan Ibukota Negara yaitu yang pertama faktor yaitu faktor sikap dan kepribadian. Persepsi mahasiswa Fisip Untan dalam menilai pemindahan Ibu kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terbentuk karena adanya sikap dan kepribadian individu mahasiswa yang menginginkan adanya perubahan yang lebih baik untuk negara Indonesia serta kepribadian mahasiswa Fisip Untan yang optimis dan percaya pada pemerintah dalam pengambilan dan eksekusi kebijakan yang dibuat. Kedua, faktor informasi yang diperoleh dan pengetahuan. Faktor sangat berpengaruh pada pembentukan persepsi mahasiswa Fisip Untan. Hal ini disebabkan informasi yang di peroleh akan membentuk pengetahuan mahasiswa mengenai pemindahan Ibukota Negara dan dengan pengetahuan yang ada, itu menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa Fisip Untan yang kemudian menyetujui pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur berdasarkan banyak alasan mulai dari kondisi Ibukota Negara di DKI Jakarta saat ini yang sudah tidak memadai, persiapan atau strategi pemindahan Ibukota Negara yang telah dilakukan pemerintah serta dampaknya bagi perekonomian nasional dan pembangunan infrastruktur secara lebih merata.

Adapun saran dari penelitian ini adalah mahasiswa harus lebih memperhatikan faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa dalam faktor internal dan eksternal supaya tidak hanya dipengaruhi oleh dua aspek dominan yaitu aspek sikap dan kepribadian dan aspek informasi yang diperoleh dan pengetahuan, namun juga bisa dipengaruhi oleh aspek lain juga. Salin itu, saran untuk pemerintah

diharapkan untuk lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai pemindahan Ibukota Negara ini kepada masyarakat, termasuk mahasiswa, dengan harapan masyarakat serta mahasiswa bisa mendukung kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini akan menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang lebih baik. Untuk mahasiswa, harus bisa mengetahui lebih banyak informasi mengenai kebijakan yang diambil pemerintah yang berdampak pada masyarakat termasuk pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur. Ini adalah bentuk kepedulian kepada masyarakat sebagai seorang mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan lebih banyak memperoleh informasi-informasi yang aktual dari sumber-sumber yang terpercaya.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aldi Mayung Sera

Nomor Mahasiswa : E1051181042

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



(Aldi Mayung Sera)

MOTTO

“Jangan Pernah Menjadi Sombong”

(aldi_ms)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya, Ayah Marita dan Ibunda Yunita serta adik saya, Januardi Aden Herdianta dan Alia Maya Stefani yang selama ini telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan secara moril dan materil.
2. Teman-teman Angkatan Eternity 2018, keluarga besar Himapol (Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik), IMKP (Ikatan Mahasiswa Fisip Untan) Fisip Untan dan DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) Fisip Untan yang telah memberikan dukungan sehingga saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk sahabat terbaik saya dalam suka-maupun duka, Aliyong dan Sandrianus terima kasih sudah hadir dihidup ini dan menjadi bagian dari cerita perkuliahanku. Tetaplah jadi sahabat dan saudaraku.
4. Spesial untuk Chennie, support sytem yang menemani saya dan mau berjuang bersama, dialah yang selalu mensupport saya untuk terus semangat dalam melakukan bimbingan dan revisian skripsi sampai selesai. Teruslah menjadi penyemangat dan partner hidup, sekarang dan seterusnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya serta kasihnya yang tak terbatas, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan baik. Usulan penelitian ini yang berjudul “*Persepsi Mahasiswa Fisip Untan Terhadap Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur*”.

Penulis menyadari tidak akan dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan baik tanpa bimbingan, saran, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penelitian mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura beserta jajarannya.
2. Drs. Asmadi, M. Si selaku Kepala Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akadaemik (PA) yang selalu memberikan kemudahan dan saran selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
3. Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing pertama dan Drs. Asmadi, M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, memotivasi dan membimbing saya selama penulisan penelitian ini.

4. Kepada Bapak/Ibu Dosen, staf tata usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan.

Semoga segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan mendorong penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dan semoga kebaikan dapat di balas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam penyusunan usulan penelitian ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi usulan penelitian yang di harapkan.

Pontianak, Maret 2023

Aldi Mayung Sera

E1051181042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
RINGKASAN PENELITIAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Identifikasi Masalah	10
1.1.3 Fokus Penelitian	11
1.1.4 Rumusan Masalah	11
1.1.5 Tujuan Penelitian	12
1.1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kajian Konsep	13
2.1.1 Konsep Persepsi	13
2.1.2 Mahasiswa	16
2.1.3 Konsep Ibukota Negara	20
2.2 Mekanisme Pemindahan Ibukota Negara	22
2.3 Teori tentang Psikologi Politik	31
2.4 Hasil Penelitian yang Relevan	36
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	38
BAB III	41
METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	42

3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.3.1	Lokasi Penelitian.....	43
3.3.2	Waktu Penelitian.....	43
3.4	Subjek dan Objek Penelitian	44
3.4.1	Subjek Penelitian.....	44
3.4.2	Objek Penelitian.....	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	45
3.6	Instrumen Pengumpulan Data	47
3.7	Analisis Data	48
3.8	Keabsahan Data (Uji Validitas).....	49
3.9	Teknik Analisis Data	50
BAB IV		53
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		53
4.1	Keadaan Geografis dan Sejarah Singkat Fisip Untan.....	53
4.1.1	Keadaan Geografis Fisip Untan.....	53
4.1.2	Sejarah Singkat Fisip Untan	53
4.2	Visi, Misi dan Tujuan Fisip Untan	56
4.2.1	Visi Fisip Untan.....	56
4.2.2	Misi Fisip Untan	56
4.3	Struktur Organisasi Fisip Untan	57
4.4	Sarana dan Prasarana.....	59
4.5	Gambaran Umum Mahasiswa Fisip Untan.....	60
4.6	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fisip Untan.....	69
4.6.1	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).....	69
4.6.2	Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)	70
4.6.3	Bengkel Seni Fisipol (BSF)	70
4.6.4	Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam (GEMPA).....	70
4.6.5	Forum Komunikasi Mahasiswa Islam (FKMI) Nuruddin.....	71
4.6.6	Kerabat Mahasiswa Katolik (KEWAKA).....	71
4.6.7	Ikatan Mahasiswa Kristen Protestan (IMKP)	71
4.6.8	Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi).....	72
4.6.9	Persatuan Sepak Bola (PS Fisip).....	72
4.6.1	Komunitas Model Fisip Untan.....	72
4.7	Kriteria Informan.....	73

4.8 Profil Informan	Error! Bookmark not defined.
BAB V	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
5.1 Deskriptif Hasil Penelitian	75
5.2 Analisis	105
BAB VI	116
PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	121
C. Keterbatasan Penelitian	123
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

Ibu kota berasal dari bahasa Latin caput yang berarti kepala (head) kemudian dikaitkan dengan kata capitol yang berarti letak bangunan pusat pemerintahan utama dilakukan. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual. Dalam perannya sebagai pusat pemerintahan, ibu kota umumnya difungsikan sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi sehingga ibu kota memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak negara yang menjadikan satu kota besar dalam negaranya menjadi ibu kota sebagai cerminan keunikan dari sisi kehidupan bermasyarakat, berekonomi, berbudaya, berbangsa dan bernegara, sehingga ibu kota memiliki peranan penting dalam memperkenalkan karakter dan identitas suatu negara.

Ibu kota identik dengan sebutan kota multifungsi yang mempunyai misi diplomatik, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang sangat berkembang, keidentikan ini menjadikan ibu kota sebagai kota tujuan urbanisasi. Negara-negara di dunia membangun ibu kotanya dengan cara yang berbeda-beda, dengan melanjutkan kota yang menjadi ibu kota di masa lalu atau membangun ibu kota baru di kota yang berbeda. Sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia memiliki ibu kota yang menjadi pusat dari fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagian kecil negara lain memisahkan pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya

ke kota yang berbeda seperti Belanda (Amsterdam dan The Hague), Afrika Selatan (Pretoria, Bloemfontein, dan Cape Town), Bolivia (La Paz dan Sucre), Swaziland (Lobamba dan Mbabane), Malaysia (Kuala Lumpur dan Putrajaya), dan Sri Lanka (Colombo dan Sri Jayawardenapura Kotte).

Lazimnya, pemindahan ibu kota pada beberapa negara disebabkan oleh beberapa faktor seperti dasar efisiensi, bencana, politik dan sebagainya. Adapun wacana pemindahan di ibu kota di Indonesia dapat diidentifikasi pada sejumlah faktor:

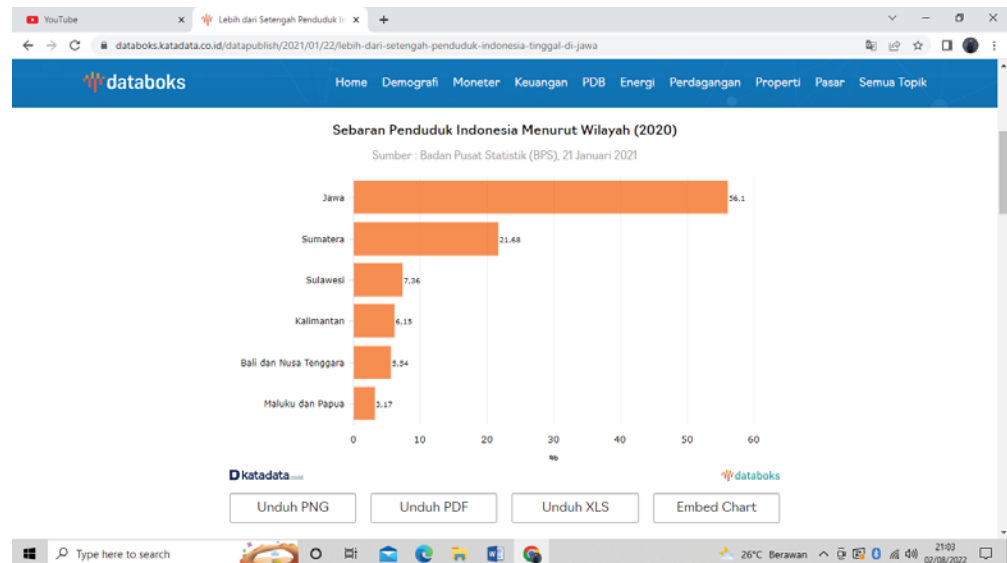
1. Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi, yang mana Jakarta dinilai tidak efektif dan efisien sebagai ibu kota, dikarenakan kemacetan kronis di Jakarta, baik di lalu lintas darat, udara (bandara) ataupun laut (pelabuhan) . Oleh sebab itu, atas dasar efektivitas dan efisiensi, Presiden RI menetapkan pemindahan ibu kota yang sedianya akan dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2024. (penetapan tersebut dilaksanakan sebelum Pandemi COVID-19 di Indonesia, dan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai batal atau tidaknya pemindahan ibu kota).

Berkaitan dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan di Indonesia sejak kemerdekaan 1945 cenderung bersifat tersentralistik di Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa jauh lebih maju dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Berbagai pusat-pusat institusi berada di Pulau Jawa. Menurut data dari *databoks.katadata.co.id*, Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan penduduk Indonesia masih terpusat di

Pulau Jawa, meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta penduduk atau 56,1% dari total penduduk Indonesia. Sementara wilayah Maluku dan Papua memiliki persentase terkecil, yaitu 3,17% penduduk dari total penduduk Indonesia, perhatikan tabel berikut:

Gambar 1.1

Sebaran Penduduk Indonesia Menurut Wilayah (2020)



Sumber: databoks.katadata.co.id

Diharapkan dengan pindahnya ibu kota, maka perputaran roda perekonomian tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bila dikaitkan dengan konsep di ilmu Ekonomi, hal ini sejalan dengan teori lokasi yang mana terkait dengan keputusan lokasi, yakni keputusan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan memutuskan di mana lokasi pabriknya atau fasilitas-fasilitas produksinya secara optimal.

Berpindahnya pusat pemerintahan tentu akan diikuti oleh sejumlah perusahaan, atau setidaknya BUMN di Indonesia akan banyak berpindah ke Kalimantan. Karena lokasi produksi khususnya BUMN seyogyanya dekat dengan pusat pemerintahan.

Isu pemindahan ibu kota negara kembali bergema bulan lalu. Sejak zaman Presiden Soekarno, pemindahan ibu kota selalu muncul ke permukaan. Menurut data BPS pada tahun 2017, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. DKI Jakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 15.366,87 jiwa/km². Dalam mengurangi tingkat kepadatan penduduk yang berhubungan langsung dengan kemacetan di Jakarta, pemindahan ibu kota dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Akan tetapi, pemindahan ibu kota memunculkan paradigma tersendiri karena daerah-daerah yang direncanakan belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjadi ibu kota negara.

Dilansir dari kompas.com, isu sosial dan politik juga akan muncul ketika pemindahan ibu kota telah sepenuhnya dilaksanakan. Salah satu isu sosial yang akan muncul adalah “*culture shock*”. Kebudayaan sosial yang biasa diterapkan pada daerah tersebut mengalami perubahan dalam waktu singkat sehingga terjadi kejutan yang dapat menciptakan kesenjangan kebudayaan sosial. Dengan dinamika ibu kota yang memerlukan kecepatan dan ketepatan waktu yang tinggi, efek kejutan akan terjadi, terutama bagi masyarakat sekitar yang terbiasa tidak merasakan dikejar-kejar oleh waktu. Selain itu, ibu kota akan mengundang imigran dari luar daerah

sehingga akan terjadi urbanisasi yang terjadi secara cepat yang dapat memberikan efek kejut masyarakat yang terbiasa saling mengenal dalam satu kampung akan menemui perkumpulan atau orang-orang baru di lingkungan mereka pada masa awal pemindahan ibu kota. Tentunya efek kejut ini tidak akan selamanya dirasakan, hal ini hanya akan dirasakan pada masa awal-awal pemindahan sehingga pada jangka panjang masyarakat akan terbiasa dengan adaptasi dengan situasi ibu kota.

Isu yang juga menarik untuk dibahas adalah kepentingan politik pada pemindahan ibu kota. Seperti yang kita ketahui saat ini ibu kota Indonesia yang saat ini masih berada di Jakarta dipimpin oleh pemimpin dari pihak oposisi pemerintahan pusat. Hal ini tentunya membuat pemerintah pusat merasa tidak nyaman dalam melakukan kebijakannya karena merasa berada di bawah pengaruh pihak oposisi. Hal ini diperkuat dengan turunnya *approval* pada partai-partai yang disokong oleh pemerintah pusat (PDIP, Hanura, PKB, Gerindra, Nasdem dan lain-lain) dikalahkan oleh partai-partai oposisi (seperti PKS). Dengan pemindahan ibu kota ini juga bertujuan untuk memenuhi janji pemerintah untuk melakukan pemerataan ekonomi di daerah-daerah luar Jawa. Di pulau-pulau nusantara lainnya, *approval* pemerintah relatif lebih rendah dan dapat dikatakan hampir bersaing dengan pihak oposisi. Dengan pemindahan ibu kota ini pemerintah bertujuan untuk meningkatkan legitimasi mereka di luar pulau Jawa sehingga dapat memperkuat posisi mereka pada pemilu-pemilu yang akan datang.

Langkah pemerintah untuk memulai program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan masih menuai pro dan kontra. Isu ini terus berjalan dengan ragam topik, mulai dari pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN),

naskah akademik, hingga kasus Edy Mulyadi. Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani menyetujui pengesahan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara pada 18 Januari 2022 lalu. Sebelumnya, UU IKN secara resmi mulai dibahas oleh Pansus IKN pada masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 pada 7 Desember 2021. Pansus IKN melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Keuangan, Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan HAM. Bersamaan dengan rapat 18 Januari 2020 itulah, turut disepakati pemberian nama “Nusantara” sebagai Ibu Kota Negara.

Pengesahan UU IKN ini rupanya menjadi momentum naiknya kembali isu mengenai pemindahan ibu kota di masyarakat dengan ramainya perbincangan di media sosial. Padahal, isu pemindahan ibu kota ini sebelumnya mulai surut atau hanya sesekali muncul di perbincangan warganet selama 2021. Misalnya di April 2021 lalu, saat gambar desain bangunan Istana Negara karya Nyoman Nuarta tersebar di lini masa media sosial.

Dari perbincangan isu ini, dapat dipetakan tiga topik pembahasan warganet yang dominan di isu ini. Ketiganya ialah penolakan UU IKN dan rencana pemindahan ibu kota, naskah akademik pemindahan ibu kota, serta kasus Edy Mulyadi. Pertama, penolakan UU IKN beserta rencana pemindahan ibu kota. Penolakan warganet atas rencana pemindahan ibu kota dan pengesahan UU IKN yang mulai muncul pada 18 Januari lalu berimbas pada lebih banyaknya sentimen negatif dalam perbincangan isu ini selama sepekan.

Topik kedua yang dibahas warganet ialah pembahasan terkait Naskah Akademik UU IKN. Inilah pembahasan substansial dan mendasar yang seharusnya terjadi, meskipun banyak warganet mengomentari bahwa kualitasnya mirip makalah biasa dan terkesan asal tulis. Padahal, menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, Naskah Akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada banyak kejanggalan di naskah akademik tersebut. Misalnya landasan sosiologis yang disebut-sebut namun tidak dijelaskan teori sosiologis yang dirujuk. Beberapa contoh di antaranya:

1. Landasan sosiologis: Dalam naskah akademik UU IKN bab IV halaman 175 disebutkan: “Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.”
2. Landasan sosiologis: “Uraian pada BAB II telah menguraikan dengan rinci bagaimana penerapan teori-teori, asas/prinsip, dan gagasan-gagasan mengenai tata kelola pemerintahan akan menyelesaikan masalah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek ekonomi dan bisnis, penataaan ruang, penatagunaan tanah, pemerintahan yang bersih dari korupsi, lingkungan hidup yang lebih baik, ketahanan terhadap bencana yang mumpuni, dan pencegahan kejahatan yang lebih mantap.”
3. Landasan sosiologis: “Dari sisi negara, tentu tata kelola Ibu kota Negara yang akan dituangkan di dalam RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi

kebutuhan yang mendesak agar seluruh administrasi pemerintahan IKN dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.”

Para peneliti menyebutkan, NA RUU IKN dari Bappenas tidak mencoba menjabarkan apa saja bukti-bukti “fakta empiris” yang dimaksud, menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan “yang lebih mantap”, serta apa saja kajian “kebutuhan yang mendesak” yang diarahkan. Profesor hukum tata negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, mengkritik keras bahwa NA UU IKN tidak memberikan data yang proporsional. Hampir sebagian besar isi dari NA tersebut hanya sekadar menjustifikasi keinginan Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara (dikutip dari tirto.id).

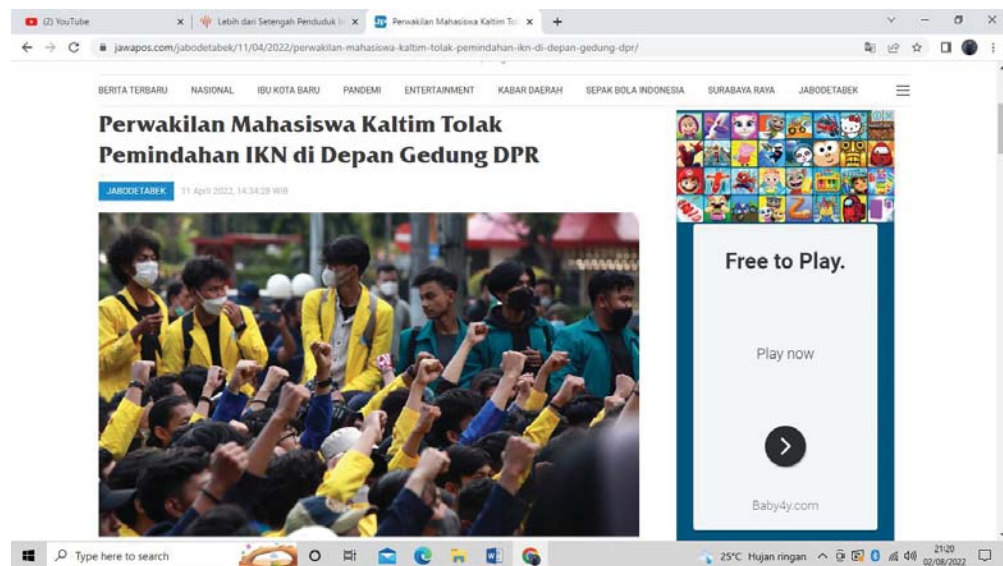
Terlepas dari semua kekurangan dari naskah akademik tersebut, sorotan yang tidak kalah penting ialah bentuk pemerintahan IKN yang otoriter. Artinya, dalam naskah akademik disebutkan bahwa IKN akan langsung diawasi oleh DPR dan Kepala IKN dipilih dengan cara penunjukan, bukan melalui proses demokrasi seperti pemilihan kepala daerah lainnya. Lagi-lagi, landasan dipilihnya sistem tersebut tidak dijelaskan dalam Naskah Akademik UU IKN.

Topik selanjutnya yang masih hangat bergulir ialah kasus dugaan penghinaan yang dilakukan Edy Mulyadi. Kendati dirinya sudah memberikan klarifikasi permintaan maaf kepada publik, namun banyak pihak masih belum puas dan menuntut penindakan hukum terhadap dirinya. Selain penindakan hukum, para tokoh adat beserta Aliansi Masyarakat Dayak menuntut Edy Mulyadi untuk menjalani proses hukum adat.

Sebagai salah satu bagian terpenting dari masyarakat, tentu ada reaksi yang juga dari golongan mahasiswa. Ada yang menerima dan ada yang menolak, seperti yang diberitakan dimedia, seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2

Aksi Demo Tolak IKN



Sumber: Jawapos.com

Gambar diatas menunjukkan peserta demonstrasi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah tiba di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyampaikan aspirasinya pada senin 11 april 2022. Para mahasiswa tiba di pintu masuk DPR/MPR RI untuk mengatur masa. Orator demo juga menginstruksikan pada para pasukannya agar tetap memberikan jalan bagi pengendara yang lewat jalan Gatot Soebroto Jakarta Selatan. Saat itu lingkungan depan gedung DPR telah dipadati oleh para mahasiswa. Salah satu perwakilan dari

mahasiswa salah satu Universitas di Kalimantan Timur, Alfin menyampaikan penolakannya terhadap pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara di daerahnya.

Berbeda dari biasanya, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura (FISIP UNTAN) kali ini tidak menyampaikan sikap dan tanggapan secara spesifik terkait pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur. Padahal seperti yang kita ketahui, mahasiswa Fisip Untan dikenal sebagai mahasiswa yang paling cepat menanggapi isu-isu terkini, secara khusus dibidang sosial dan politik, seperti perancangan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan lain-lain dalam bentuk pernyataan sikap, kajian, mimbar bebas maupun demonstrasi.

1.1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan, terdapat banyak pro-kontra yang terjadi. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI melakukan aksi demonstrasi.
2. Terdapat banyak kejanggalan dalam naskah akademik UU IKN, misalnya landasan sosiologis yang disebut-sebut namun tidak dijelaskan teori sosiologis yang dirujuk serta terkesan terlalu umum.

3. Terdapat banyak informasi yang tidak akurat sehingga menimbulkan pertanyaan masyarakat berkaitan dengan kepentingan politik pemerintah melawan kubu oposisi.
4. Tidak adanya pernyataan sikap secara terang-terangan oleh mahasiswa Fisip Untan terkait pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur.

1.1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian agar peneliti dapat terarah dan tidak menyimpang dari prosedur penelitian, baik dalam pengumpulan data maupun menganalisis data agar dapat memfokuskan lingkup permasalahannya, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan masalah tersebut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Fisip Untan terhadap pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

1.1.4 Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian dan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Fisip Untan terhadap proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Fisip Untan terhadap proses pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur?"

1.1.5 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui berbagai pandangan dan persepsi mahasiswa Fisip Untan terhadap proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang disertai alasan dan saran saran yang sesuai dan mengetahui factor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa Fisip Untan.

1.1.6 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi referensi dan literatur dalam memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu politik dan dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji masalah pemindahan ibukota negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berguna untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan serta syarat untuk memperoleh gelar sarjana serta diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada mahasiswa agar meningkatkan kemampuan analisis dan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan prioritas yang berpengaruh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.